

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

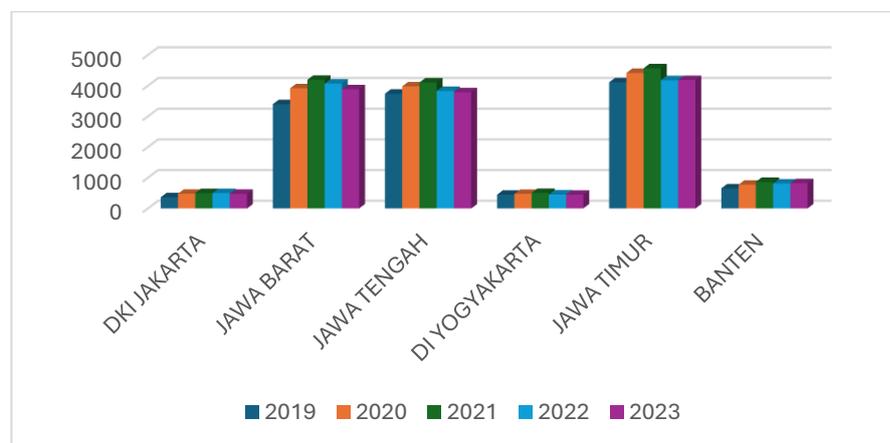
### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks dan multidimensional, merampas hak asasi individu dan kelompok untuk memiliki kehidupan layak. Menurut (Manalu *et al.*, 2024) dalam mengartikan kemiskinan ialah ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum. Selain itu kemiskinan juga diartikan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu cara mengukur kemiskinan di suatu daerah adalah dengan menghitung persentase penduduk miskin di wilayah tersebut. Jumlah ini dapat dihitung berdasarkan kategori perdesaan, perkotaan, atau wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan (Fatmawati & Aisyah, 2023) berpendapat bahwa kemiskinan ialah salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara komprehensif.

Kemiskinan masih menjadi momok terbesar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, serta menantang fondasi pembangunan ekonomi dan sosial. Lebih dari sekadar permasalahan ekonomi, dampaknya luas terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas nasional membuat masalah sehingga menjadi sorotan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya prioritas, permasalahan mengenai kemiskinan menjadi sebuah keharusan untuk diatasi sebagai perwujudan visi pembangunan berkeadilan. Jumlah penduduk miskin di berapa provinsi di Indonesia cukup menarik dibahas.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang penduduk miskin tertinggi selama 5 tahun berturut turut dari tahun 2019-2023. Kemudian di susul oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah juga masi terdapat banyak penduduk miskin, kemudian Provinsi Banten menempati urutan ke empat, di urutan ke lima Provinsi DKI Jakarta dan diurutan terakhir yaitu Provinsi DIY Yogyakarta. dimana dapat ditampilkan dalam grafik dibawah ini selama tahun 2019 – 2023:

**Gambar 1. 1** Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2019-2023 (Ribu Jiwa)



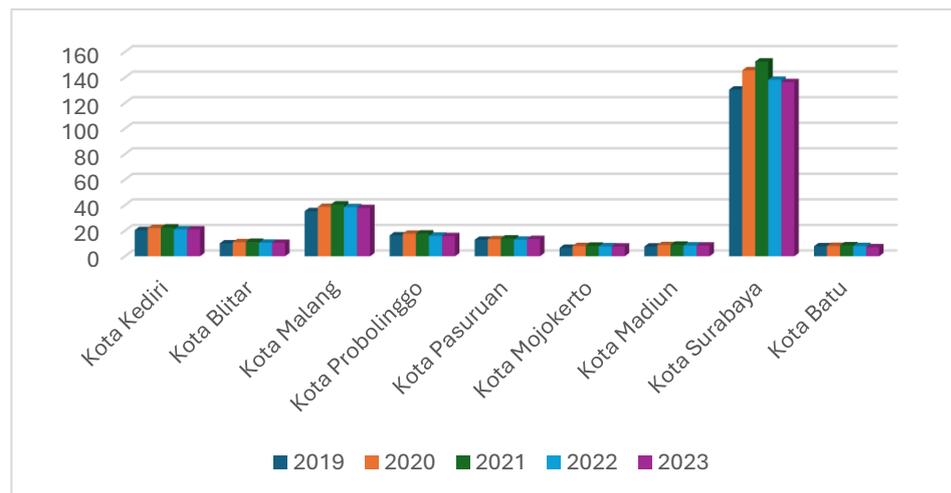
*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (diolah)*

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 38 wilayah administratif, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Pembagian wilayah tersebut mencerminkan keragaman geografis dan sosial ekonomi di masing-masing wilayah. Secara administratif keduanya berada pada tingkat yang sama di bawah provinsi, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup menarik seperti dari aspek pemerintahan, luas wilayah, karakteristik sosial ekonomi, serta kepadatan penduduk. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sementara kota dipimpin oleh seorang wali kota.

Umumnya kabupaten memiliki wilayah yang lebih luas, mencakup banyak daerah pedesaan dan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat, sedangkan kota cenderung memiliki wilayah yang lebih kecil namun memiliki jumlah penduduk padat. Dalam aspek ekonomi kabupaten umumnya bersifat agraris dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, sedangkan kota lebih menonjol dalam sektor perdagangan, jasa, dan industri.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, wilayah perkotaan di Jawa Timur memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan wilayah kabupaten, terutama dalam struktur ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada sembilan kota di Jawa Timur untuk memahami bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.

**Gambar 1. 2** Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 (Ribu Jiwa)



*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (diolah)*

Kondisi kemiskinan di sembilan kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan variasi cukup signifikan. Berdasarkan gambar diatas, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk miskin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain,

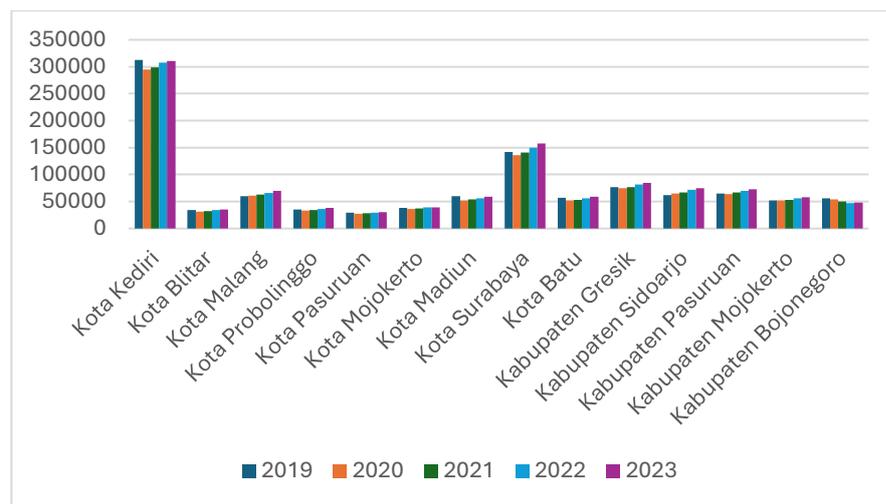
menunjukkan bahwa meskipun kota ini merupakan pusat ekonomi terbesar di Jawa Timur, tantangan kemiskinan tetap menjadi isu penting sehingga perlu diperhatikan. Sementara itu, kota-kota lain seperti Kota Malang, Kota Kediri, dan Kota Probolinggo memiliki jumlah penduduk miskin relatif lebih kecil, tetapi tetap menunjukkan pola fluktuatif dari tahun ke tahun.

Secara sederhana, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana individu atau kelompok tertentu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan dan memiliki kehidupan layak, mulai dari pangan, sandang, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, faktanya kemiskinan melibatkan dinamika jauh lebih dalam. Ketika pembangunan suatu daerah mengalami kegagalan dalam pemerataan, kemiskinan menjadi akar dari berbagai masalah sosial lainnya seperti kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan keterbelakangan. Dalam skala lebih besar kemiskinan dapat menjadi penghambat utama pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkaran setan sehingga sulit diputus.

Untuk memutus siklus kemiskinan, diperlukan upaya pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Salah satu cara efektif adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai indikator kinerja ekonomi daerah. Pertumbuhan ini sering berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan, karena pendapatan tinggi me kan individu memenuhi kebutuhan dasar.

Secara teori jika PDRB perkapita tinggi merupakan ukuran kemajuan sebuah negara atau daerah karena menunjukkan tingginya daya ekonomi suatu wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Sari & Novianti, 2024). Namun hal itu tidak terjadi di Provinsi Jawa Timur dikarenakan ketidakmerataan distribusi pendapatan sehingga teori tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

**Gambar 1.3** PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah)



*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (diolah)*

Berdasarkan Gambar 1.3 terdapat perbedaan signifikan dalam kontribusi ekonomi wilayah di Jawa Timur selama 2018-2023. Kota Kediri mencatatkan PDRB per kapita tertinggi, rata-rata 304 juta rupiah, didorong oleh keberadaan industri rokok PT. Gudang Garam. Kota Surabaya menempati posisi kedua dengan 143 juta rupiah karena perannya sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Jawa Timur. Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan berada di peringkat tiga hingga lima dengan PDRB per kapita masing-masing 78 juta, 66,75 juta, dan 66,5 juta, didukung sektor industri. Kota Malang, Madiun, dan Batu juga mencatat PDRB cukup tinggi, berkisar 55–62 juta, berkat sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan. Kabupaten

Mojokerto dan Bojonegoro melengkapi daftar sepuluh besar dengan PDRB per kapita masing-masing 53 juta dan 51 juta.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki PDRB per kapita sangat tinggi, menempati posisi kedua di Jawa Timur, mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi di kota tersebut. Namun, meskipun memiliki PDRB dengan nilai tinggi dan menjadi pusat perekonomian utama di Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Surabaya juga tetap tinggi dibandingkan kota-kota lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, kemungkinan akibat tingginya ketimpangan pendapatan, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta distribusi investasi yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian Kota Kediri secara konsisten memimpin PDRB Perkapita tertinggi, hal ini menunjukkan kesenjangan cukup signifikan antara kota Kediri dengan daerah lain. Secara keseluruhan kontribusi PDRB per kapita tertinggi dihasilkan oleh kota-kota besar di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Fluktuatif pada PDRB tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan, sehingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan inklusif dan berkualitas juga harus menjadi prioritas, melalui pendidikan diharapkan adanya tenaga kerja yang terampil sebagai fondasi utama dalam menaikkan produktivitas dan inovasi sumber daya manusia. Kemiskinan tetap menjadi masalah serius di Provinsi Jawa Timur meskipun provinsi ini memiliki PDRB Per kapita dengan nilai relatif tinggi.

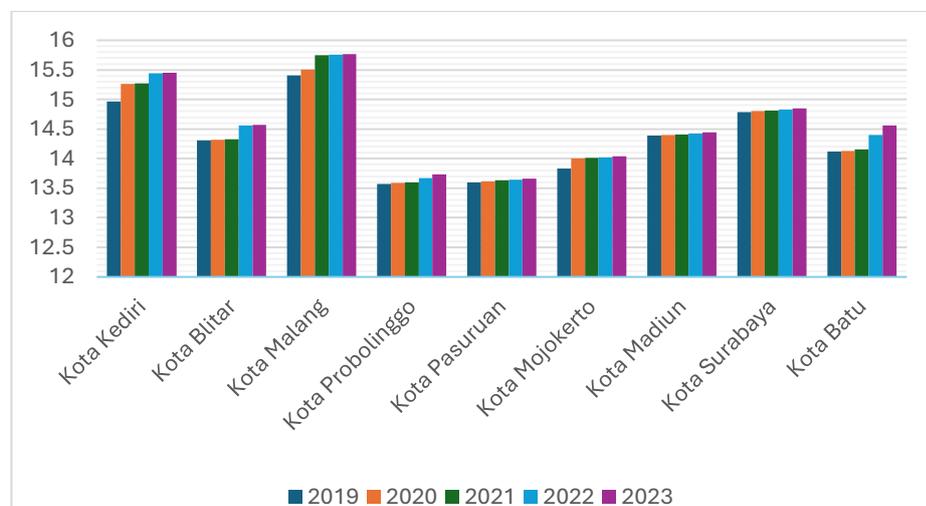
Beberapa penelitian sebelumnya membahas variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan kemiskinan, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh, studi membahas mengenai pengaruh PDRB Perkapita terhadap kemiskinan yaitu (Febriaty, 2020) menunjukkan bahwa variabel PDRB Per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara. Namun penelitian (Karimah *et al.*, 2024) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif, hubungan antara PDRB per kapita dan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat tidak signifikan, dengan kata lain penelitian ini menyatakan hubungan PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan untuk menggali lebih lanjut hubungan PDRB per kapita terhadap kemiskinan, khususnya dalam konteks Provinsi Jawa Timur.

Selain PDRB Per kapita, faktor lain juga memiliki kaitan dengan kemiskinan yaitu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk individu atau masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, karena dengan pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas hidup dengan melatih *soft skill* dan *hard skill* yang bermanfaat di dunia kerja. Oleh karena itu, salah satu investasi tepat untuk pembangunan ialah pendidikan, karena dampaknya dapat dirasakan di kemudian hari (Susanto & Pangesti, 2019). Pendidikan berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Daerah dengan akses dan kualitas pendidikan lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, karena individu berpendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan layak.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu indikator untuk mengukur pendidikan di suatu wilayah. Harapan lama sekolah mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di masa depan. Ukuran ini dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan digunakan untuk menilai perkembangan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Melalui indikator ini dapat diketahui berapa lama waktu tempuh yang diharapkan untuk anak-anak menjalani pendidikan hingga 12 tahun ke atas (Siskawati & Zulphi Surya, 2021).

Kota Surabaya dan Kota Malang, sebagai kota besar di Jawa Timur dikenal sebagai pusat pendidikan terbaik dengan perguruan tinggi ternama dan sekolah berkualitas di berbagai jenjang. Banyaknya perguruan tinggi dan sekolah memiliki kualitas apik, tidak membuat kota-kota besar di Jawa Timur lepas dari permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan. Kemiskinan ini masih menjadi tantangan khususnya di kota kecil dan daerah pinggiran.

**Gambar 1.4** Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan Kota Kediri, Kota Malang dan Kota Surabaya memiliki angka harapan lama sekolah tinggi. Akan tetapi, tinggi angka HLS ini hanya ada di tiga kota tersebut, sedangkan kota-kota lain masih memiliki angka relatif rendah seperti Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan. Perbedaan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) meskipun berada di wilayah kota dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesenjangan insfratuktur pendidikan dan keterbatasan akses pendidikan tinggi. Kota Surabaya dan Kota Malang terkenal memiliki fasilitas pendidikan jauh lebih lengkap dibanding dengan kota lain di Jawa Timur, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi ternama, didukung oleh tenaga pendidik berkualitas. Berbanding terbalik dengan kota Probolinggo dan Pasuruan, tidak memiliki perguruan tinggi atau institusi pendidikan cukup banyak, sehingga dapat dikatakan kota-kota ini memiliki insfratuktur pendidikan lebih terbatas dibandingkan Kota Surabaya dan Malang.

Meskipun sudah berstatus kota, perbedaan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mencerminkan adanya kesenjangan dan tidak meratanya pembangunan insfratuktur, akses pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi. Kota Surabaya dan Malang dapat dikatakan berhasil dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik, sementara kota-kota kecil di Jawa Timur masih membutuhkan intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena pemerataan pembangunan pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung pengentasan kemiskinan.

Penelitian mengenai pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan hasil beragam. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tuban menyebutkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dimana tingkat pendidikan masih belum bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tuban (Sholikhah *et al.*, 2021). Sebaliknya menurut penelitian lain menyebutkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY (Ridzky Giovanni, 2018). Dikarenakan hanya sedikit lulusan sekolah di berbagai golongan tingkat pendidikan yang tidak mempunyai *skill* khusus untuk terjun di dunia kerja, sehingga ketimpangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tetap tinggi, menyebabkan peningkatan kemiskinan di daerah yang diteliti.

Distribusi kekayaan tidak merata atau juga disebut ketimpangan pendapatan menggambarkan kondisi dimana sebagian besar kekayaan atau pendapatan hanya dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Kemudian ketimpangan pendapatan juga dapat diartikan sebagai distribusi tidak proposional dari pendapatan nasional total diantara berbagai jenis rumah tangga dalam negara (Saleh & Rizkina, 2021). Kondisi ini mengakibatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya ekonomi dan layanan dasar sebagai kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain pendidikan, ketimpangan pendapatan juga dapat menjadi faktor dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan ini terjadi karena tidak merata distribusi pendapatan dapat menjadi aspek penting untuk mengukur pemerataan pendapatan disuatu negara, indikator yang digunakan biasanya adalah gini ratio (Rembang *et al.*, 2009).

Gini ratio adalah indikator untuk mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan di suatu daerah, angkanya berkisar antara nol (berarti

pemerataan sempurna) hingga 1 (artinya tingkat ketimpangan tinggi). Ketimpangan pendapatan dikatakan pada tahap sedang jika angkanya berada di bawah 0,3. Ketimpangan rentan apabila angka berada pada 0,3 sampai 0,5 yang mengartikan terjadinya ketimpangan yang tinggi bahkan sangat tinggi jika angka tersebut berada di atas 0,5 (Wibowo, 2016).

Umumnya ketimpangan pendapatan ini terjadi di kota besar, begitupun kota-kota di Provinsi Jawa Timur. Beberapa faktor dapat menyebabkan kondisi ini, seperti urbanisasi sehingga mendorong masyarakat pindah ke kota besar, menciptakan beragam lapisan sosial dan ekonomi. Kemudian keterbatasan akses terhadap sumber daya, di kota kota besar terdapat banyak industri dan lapangan kerja yang lebih baik dibandingkan pedesaan. Akan tetapi, faktor tersebut tidak berarti setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan kerja yang sama karena latar belakang ekonomi dan pendidikan rendah, dalam artian ketidakmertaan distribusi kesempatan kerja dan pendidikan tidak didapat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin buruk. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan hubungan yang memiliki keterkaitan dan membutuhkan perhatian khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merancang strategi yang efektif dalam mengurangi keduanya secara bersamaan.

Berdasarkan gambar dibawah ini menampilkan gini ratio kota-kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2023, terlihat adanya beragam tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah. Kota Malang secara konsisten memiliki angka tertinggi dibanding kota lain, terutama pada tahun 2023 Kota Malang mendekati angka 0.45. angka ini menunjukkan bahwa Kota Malang menghadapi ketimpangan pendapatan cukup tinggi, sesuai dengan golongan gini ratio  $> 0,4$ .

selain itu, Kota Surabaya dan Madiun juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, dengan rata-rata mendekati 0,4 selama periode 2019-2023.

**Gambar 1. 5** Data Gini Ratio Kota di Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2018-2023



*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (diolah)*

Sebaliknya, kota seperti Probolinggo dan pasuruan memiliki nilai gini ratio lebih rendah dibandingkan kota lain, umumnya berada di kisaran 0,3-0,35. Meskipun tetap ada ketimpangan, tingkatnya relatif lebih rendah dibanding Kota Surabaya dan Malang. Artinya di kota tersebut distribusi pendapatan dapat dikatakan lebih merata, akan tetapi hal tersebut tetap harus terus di turunkan nilainya oleh pemerintah daerah agar ketimpangan pendapatan tidak semakin parah. Ketimpangan pendapatan yang tinggi di kota seperti Surabaya dan Malang akan berdampak negatif bagi pertumbuhan daerah dan stabilitas sosial-ekonomi. Masyarakat berpenghasilan rendah akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan peluang ekonomi. Ketimpangan ini dapat dikendalikan melalui kebijakan retribusi tepat sasaran oleh pemerintah setempat.

Dalam konteks ketimpangan pendapatan, (Nisa *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hendy Pramana Putra, Muhammad Diaudin, 2022) menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan diukur dengan gini ratio memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Blitar pada tahun 2011-2020. Perbedaan ini membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memahami peran ketimpangan pendapatan dalam konteks regional yang berbeda.

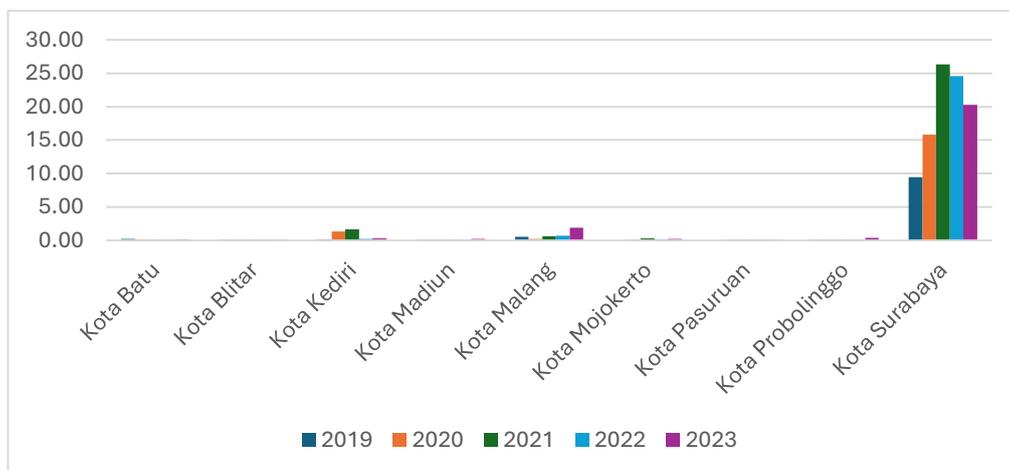
Untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah daerah juga melakukan upaya seperti menggali potensi daerah untuk meningkatkan investasi. Umumnya daerah yang mendapatkan investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat merubah kondisi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Investasi merupakan penanaman modal yang meliputi pengeluaran dan perusahaan untuk membelanjakan perlengkapan produksi serta jasa-jasa yang tersedia dalam ekonomi (Trihantana *et al.*, 2023). Sedangkan menurut (Sunariyah dalam Sutikno *et al.*, 2019) ialah penyertaan modal untuk satu atau lebih aktiva bisa dimiliki dan memiliki jangka waktu lama, diharapkan mendapat imbal hasil di masa depan. Investasi menjadi peran penting dalam upaya pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan, karena investasi modal asing maupun dalam negeri dapat mendorong perekonomian di wilayah tersebut dan membuka peluang kerja sehingga masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dari investasi tersebut tidak hanya meningkatkan ketersediaan sumber daya ekonomi akan tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, ini memungkinkan masyarakat

miskin dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup mereka.

Gambar dibawah ini menunjukkan data realisasi invetasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wilayah kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023. Kota Surabaya secara konsisten mendominasi realisasi investasi dengan angka jauh lebih tinggi dibanding dengan kota-kota lainnya. Kota Surabaya mendapatkan investasi PMDN sebesar 9,46 triliyun pada tahun 2019, kemudian tahun 2020 sebesar 15,82 trilyun, tahun 2021 sebesar 26,37 trilyun, tahun 2022 sebesar 24,56 trilyun dan terakhir di tahun 2023 sebesar 20,30 trilyun, ini menandakan peran Kota Surabaya sebagai pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang dan Kota Kediri juga mencatat angka investasi cukup signifikan meskipun nilainya masih jauh di bawah Kota Surabaya. Sedangkan kota-kota lainnya masih memiliki angka investasi yang terbilang kecil atau bahkan mendekati nol pada beberapa tahun.

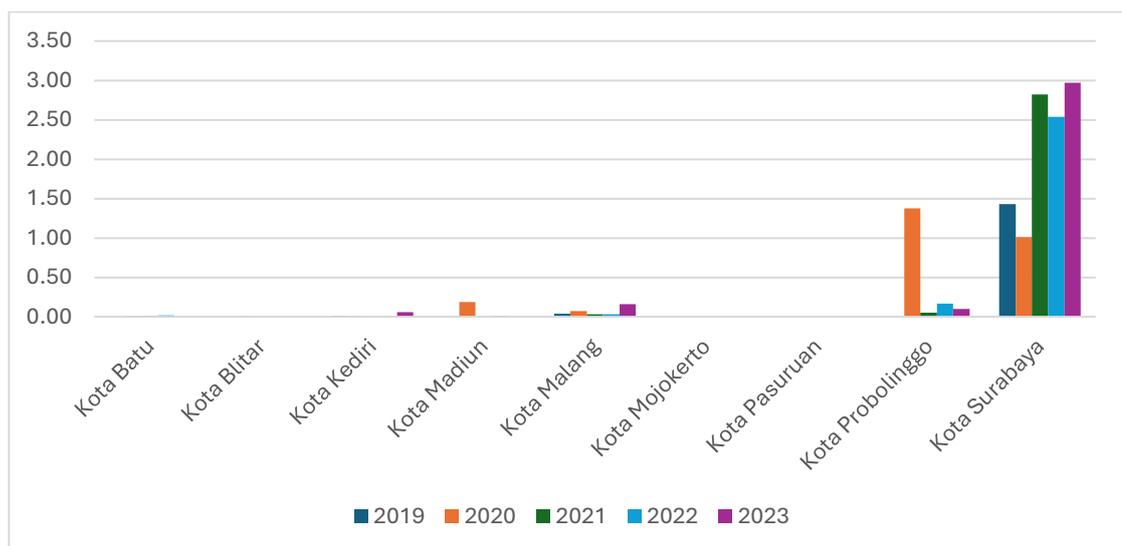
**Gambar 1.6** Realisasi Investasi PMDN Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023 (Triliyun)



Sumber: DPMPSTP Provinsi Jawa Timur, 2024 (diolah)

Kemudian Kota Surabaya kembali menjadi kota dengan angka investasi tertinggi untuk kategori Penanaman Modal Asing (PMA), sebagai ibu kota Jawa Timur, Kota Surabaya berhasil menunjukkan daya tarik sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis internasional. Disusul oleh Kota Probolinggo, memiliki nilai relatif signifikan meskipun masih mengalami naik turun dengan puncak penerimaan investasi PMA tertinggi di tahun 2020 dengan total 1,37 trilyun. Sedangkan kota-kota lain seperti Kota Malang, Madiun, Kediri, Blitar, Batu, Pasuruan hingga Mojokerto memiliki angka relatif kecil bahkan tidak ada penerimaan investasi PMA. Berdasarkan data diatas, secara keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi investasi baik PMDN maupun PMA masih terpusat di kota-kota besar, dengan sedikit penyebaran ke kota-kota lain di Jawa Timur.

**Gambar 1. 7** Realisasi Investasi PMA Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023(Triliyun)



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, 2024 (diolah)

Adapun penelitian terdahulu yang membahas pengaruh investasi terhadap kemiskinan juga memperlihatkan hasil beragam. Menurut (Pratama et al., 2022)

menunjukkan investasi PMDN memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa. Sementara dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Febriaty & Nurwani, 2017) mengemukakan bahwasannya investasi di Provinsi Sumatera Utara hanya memberikan pengaruh negative namun tidak signifikan.

Berdasarkan adanya fenomena data cukup signifikan serta ada perbedaan hasil dalam penelitian berbeda, dengan hubungan antar variable yang sama, maka peneliti menganggap beberapa variable yang telah dibahas relevan untuk diteliti kembali sehingga memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang pengaruh PDRB perkapita, pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian “**Analisis Pengaruh PDRB Per kapita, Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan dan Investasi Terhadap Kemiskinan Wilayah Kota di Provinsi Jawa Timur**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditetapkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di wilayah kota Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur?

4. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur?
5. Apakah terdapat pengaruh PDRB per kapita, pendidikan, ketimpangan pendapatan dan investasi terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh PDRB Per kapita terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur
4. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh invetsasi terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur
5. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh PDRB Per kapita, pendidikan, ketimpangan pendapatan dan investasi, terhadap kemiskinan wilayah kota di Provinsi Jawa Timur.

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kauntitatif menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama rentang

waktu 2019 hingga 2023. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur khususnya sembilan kota di Provinsi Jawa Timur yaitu, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan variabel pendukung seperti PDRB Per Kapita, pendidikan, tingkat pendapatan, dan investasi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Aspek penting dalam penelitian adalah bagaimana penelitian tersebut dapat memberikan manfaat diharapkan nantinya dapat diterapkan setelah penelitian dilakukan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis.

#### 1. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah setempat khususnya Provinsi Jawa Timur, diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi tambahan informasi dan masukan bagi instansi terkait merancang kebijakan lebih efektif, khususnya dalam upaya menekan tingkat kemiskinan dan memberdayakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi lembaga ekonomi dan sosial diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk lembaga terkait baik sektor ekonomi maupun sosial sebagai pertimbangan dalam merancang program pembangunan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan investasi dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

#### 2. Secara teoritis

- a. Sebagai referensi, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama mengenai variabel yang diteliti yaitu PDRB Per kapita, pendidikan, ketimpangan pendapatan dan investasi terhadap kemiskinan.

- b. Sebagai bahan rujukan para akademisi, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan pembandingan dalam perpustakaan yang relevan dengan bidang ekonomi dan pembangunan sosial, memperdalam pemahaman mengenai variabel yang mempengaruhi kemiskinan.